

RENCANA STRATEGIS



KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 - 2021



*Alamat. Jl. Bukit Perak No. 07
Nanga Badau Kode Pos 78767*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya penyesuaian penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badau periode 2016 – 2021 dapat diselesaikan. Walaupun masih dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dan pedoman dalam melaksanakan Visi, misi tujuan dan sasaran serta Kebijakan yang realistis, Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Badau dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.


Melalui renstra ini, kami akan menyusun Renja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pertanggung jawaban Tahunan atas keberhasilan dalam mengemban tugas di era Otonomi Daerah ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kami mengharapkan masukan demi perbaikan Dokumen Renstra ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengetahui :

KAMAT BADAU,


DIS. AHMAD SALAFUDDIN
Pembina Tk.I
NIP. 19621004 198603 1 014

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1 Gambaran Umum Kecamatan Badau.....	5
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi	12
2.3 Struktur Organisasi	17
2.4 Sumber Daya SKPD.....	17
2.5 Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	34
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	37
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	40
4.1 Tujuan SKPD.....	40
4.2 Sasaran	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	42
D. Strategi SKPD.....	42
E. Kebijakan SKPD	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	48
BAB VIII PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, sudah seharusnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas secara otonomi dapat dijalankan secara baik dan berkesinambungan serta dapat memenuhi tuntutan akan pelayanan masyarakat. Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.

Besarnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya tingkat kesejahteraan dalam segala dimensi kehidupan dalam era otonomi daerah saat ini merupakan suatu hal yang wajar, karena pada prinsipnya pembangunan sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan bertujuan mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya untuk merespon hal tersebut tentu memerlukan sebuah pengelolaan organisasi pemerintahan yang baik dan strategis serta mampu merespon segala bentuk kebutuhan pembangunan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai suatu Pemerintah Daerah Otonom dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah telah membentuk lembaga teknis daerah Kecamatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diperlukan bagi masyarakat dan perkembangan zaman.

Keberadaan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk di dalamnya Kecamatan Badau dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kecamatan Badau mengemban tugas untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan keamanan dan ketertiban, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

daerah dan peraturan kepala daerah, mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan serta menyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan..

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, maka peningkatan kinerja (performance) Kecamatan Badau mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen di Kecamatan Badau melalui penyesuaian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Badau Periode 2016 – 2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badau Periode 2016 – 2021 dimaksud untuk :memberikan arahan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan (2016-2021), dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dalam kerangka pencapaian visi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun anggaran.

Adapun Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badau Periode 2016 – 2021 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2016-2021;
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja Renja) selama periode 2016-2021 serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
3. Menetapkan komitmen kinerja (performance) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Badau Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Umum Kecamatan Badau
- 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.3 Struktur Organisasi
- 2.4 Sumber Daya SKPD
- 2.5 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

- 4.1 Tujuan SKPD
- 4.2 Sasaran SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategis SKPD
- 5.2 Kebijakan SKPD

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN I**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN BADAU

1. Kondisi Geografis

a) Iklim dan Curah Hujan

Pada umumnya Kecamatan Badau beriklim tropis dengan curah hujan cukup tinggi yaitu rata-rata pertahun 3.150 mm, sedangkan suhu udara berkisar antara 28°C – 31,05°C. Keadaan curah hujan yang cukup tinggi terjadi antara bulan September s/d Desember dan Januari s/d Mei. Sebaliknya musim kemarau terjadi antara bulan Juni s/d awal September.

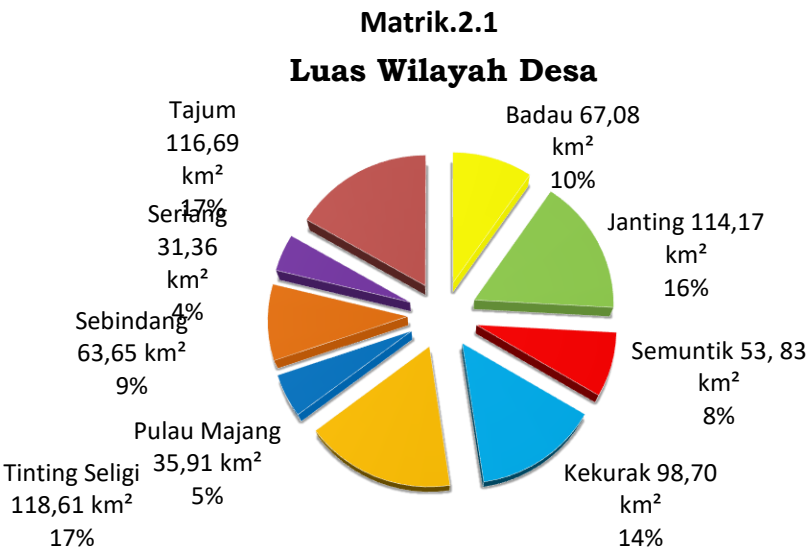
b) Batas Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Badau memiliki batas-batas administrasi pemerintahan sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Lupar.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puring Kencana dan Kecamatan Empanang.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Lubok Antu, Sriaman, Negara Sarawak, Malaysia.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Suhaid.

c) Luas Wilayah

Kecamatan Badau memiliki luas wilayah ± 700 km². Dengan demikian luas wilayah Kecamatan Badau 2,35% dari seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki wilayah 29.842 km²



Sumber : Data Pokok Kab.Kapuas Hulu 2016

Secara administratif pemerintahan Kecamatan Badau dibagi dalam 9 Desa, 20 Dusun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.1
Daftar Nama Desa dan Dusun di Kecamatan Badau

No	Nama Desa	Nama Dusun
1.	Badau	1. Badau I 2. Badau II
2.	Janting	1. Bunut lalau 2. Berangan
3.	Semuntik	1. Semuntik 2. Pesayah
4.	Kekurak	1. Kekurak 2. Perumbang
5.	Tinting Seligi	1. Sungai Telian 2. Sungai Tembaga 3. Empaik
6.	Pulau Majang	1. Majang 2. Raden Sura
7.	Sebindang	1. Sebindang 2. Mentari
8.	Seriang	1. Seriang Hulu 2. Seriang Hilir
9.	Tajum	1. Tangit I 2. Tangit II 3. Tangit IV

Sumber : Kasi Pemerintahan Kec.Badau 2016

d). Orbitasi Wilayah

Kecamatan Badau yang memiliki luas 700 km², jika diukur dari Nanga Badau Ibukota Kecamatan Badau memiliki jarak ± 177 km ke Kota Putussibau Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu atau jika ditempuh dengan kendaraan roda dua selama ±4 jam atau roda empat selama ± 5 jam perjalanan apabila kondisi cuaca bukan musim penghujan, namun pada saat musim penghujan waktu tempuh menjadi lebih lama lagi. Mengenai jarak antar desa dan jarak ke Ibukota Kecamatan dapat dilihat pada matrik berikut ini :

Matrik. 2.2

Jarak Ibukota Kecamatan ke Desa se kecamatan Badau (km)

0								
1.5	Janting							
6	4.5	Semuntik						
12	13.5	18	Kekurak					
18	19.5	25.5	5.5	Tinting Seligi				
35	36.5	41	25	20	Pulau majang			
16	17.5	22	28	34	51	Seriang		
20	21.5	26	32	38	55	4	Tajum	
2	3.5	8	14	20	37	14	18	Sebindang

Sumber : Data Pokok Kec.Badau 2016

Dari data tersebut menunjukan bawa desa terjauh adalah Desa Pulau Majang 35 km dari Ibukota Kecamatan Badau, ditempuh melalui jalur darat dan dilanjutkan dengan jalur air.

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan laporan data kependudukan Kecamatan Badau per bulan Desember 2016 Kecamatan Badau berjumlah 6.872 jiwa, yang terdiri dari 3.556 laki-laki dan 3.316 perempuan, dengan penduduk yang terbanyak di Desa Badau sebanyak **2.826** jiwa. Adapun penyebaran penduduk tersebar dimasing-masing wilayah desa yang ada di Kecamatan Badau. Jumlah terbesar penduduk di Kecamatan Badau berada di Desa Badau yakni sebesar 2.820 jiwa. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Masing-Masing Desa

No	Desa	Jumlah Penduduk
		L+P
1	2	5
1.	BADAU	2.826
2.	JANTING	430
3.	SEMUNTIK	247
4.	KEKURAK	378
5.	PULAU MAJANG	416
6.	SERIAN	544
7.	TINTING SELIGI	362
8.	SEBINDANG	492
9.	TAJUM	677
	Jumlah	6.872

Sumber : Seksi Pemerintahan Kec. Badau 2016

Dari data tersebut penduduk Sementara jumlah penduduk menurut penyebaran Kepala Keluarga (KK) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3

Data Penduduk Menurut Penyebaran KK

No	Desa	Jumlah KK	%
1	2	3	4
1.	Badau	823	30,93
2.	Janting	159	5,97
3.	Semuntik	88	3,30
4.	Kekurak	180	6,76
5.	Pulau Majang	300	11,27
6.	Seriang	176	6,61
7.	Tinting Seligi	123	4,62
8.	Sebindang	134	5,03
9.	Tajum	677	24,45
	Jumlah	2.660	100

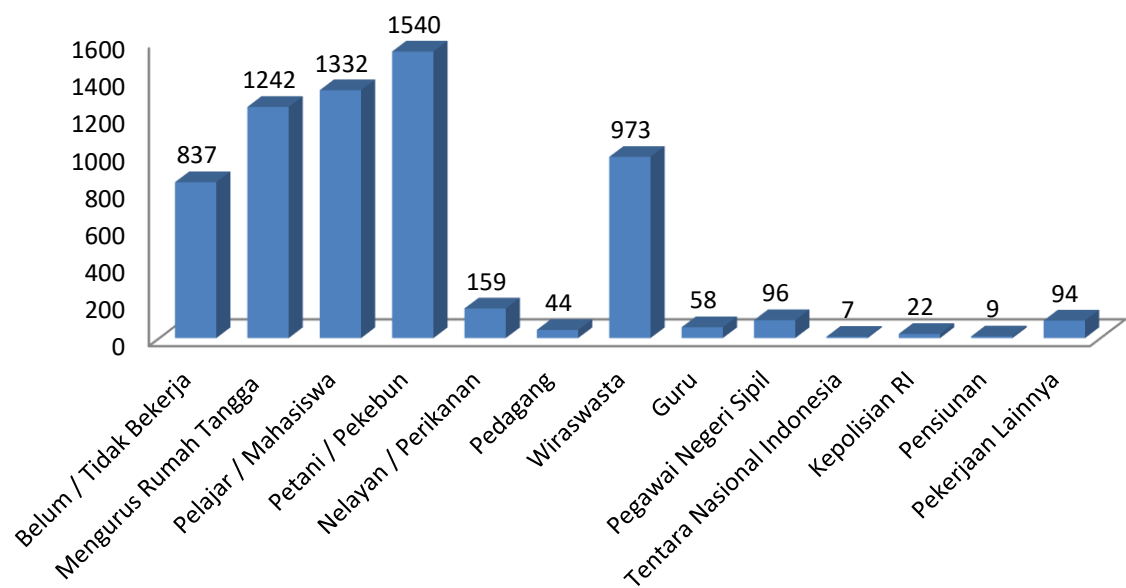
Sumber : Seksi Pemerintahan Kec. Badau 2016

Dari data tersebut KK terbanyak terdapat di Desa Badau yaitu sebanyak 823 KK atau 30,93% dan KK yang paling sedikit terbanyak di Desa Semuntik sebanyak 88 KK atau 3,33%.

Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kecamatan Badau dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini .

Matrik 2.3

Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian



Sumber : Seksi Ekonbang Kec. Badau 2016

Dari tabel 4 tersebut diketahui bahwa mata pencaharian terbesar adalah petani atau pekebun yaitu 1540 orang.Hal ini terutama dikarenakan penduduknya mayoritas tinggal di daerah pedesaan yang bermata pencaharian pokoknya bertani dan berkebun. Berikut ini adalah data penduduk Kecamatan Badau menurut tingkat pendidikan

Tabel.2.4
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Ijazah Tertinggi Yang dimiliki	Laki-Laki	Perempuan	L + P
Belum / Tidak Sekolah	826	816	1.642
PAUD/TK	43	47	90
Tidak Tamat SD Sederajat	1.044	949	1.993
SD/MI/Sederajat	620	616	1.236
SLTP/Mts/Sederajat	377	373	750
SLTA/MA/Sederajat	550	435	985
Diploma I/II	35	39	74
Akдеми/Diploma III/Sarjana Muda	19	20	39
Diploma IV / S 1	34	17	51
Strata 2	8	4	12
Starata 3	-	-	-
Jumlah	3.566	3.316	6.872

Sumber : Data Pokok Kec. Badau 2016

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan terbesar adalah tidak tamat sekolah artinya tingkat kesadaran pendidikan masyarakat Kec.Badau masih rendah.

Selanjutnya adalah tabel data penduduk Kecamatan Badau berdasarkan agama yang dianut.

Tabel. 2.5
Data Mutasi Kependudukan Tahun 2016

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pindah	20	13	33
2	Datang	25	18	43
3	Lahir	13	20	33
4	Mati	8	5	13

Sumber : Seksi Pemerintahan Kec. Badau 2016

Data mutasi penduduk tersebut di atas hasil laporan dari desa yang ada di Kecamatan Badau, adapun permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaporan tersebut yakni kurang kesadarannya masyarakat dalam mengurus administrasi

kependudukan sehingga pencatatan mutasi kependudukan sering mengalami kesulitan data.

Tabel. 2.6
Data Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	AGAMA	JUMLAH PENDUDUK /PEMELUK
1	Islam	3.503
2	Katholik	2.749
3	Kristen Prostestan	616
4	Hindu	-
5	Budha	4
6	Kepercayaan	-
7	Lainnya	-
Jumlah		6.872

Sumber : Seksi Kesra Kecamatan Badau, Desember 2016

Dari tabel di atas, untuk jumlah penduduk Kecamatan Badau mayoritas beragama islam sebanyak 3.503 orang, sedangkan untuk penduduk minoritas beragama Budha sebanyak 4 orang.

Sedangkan data jumlah rumah Ibadah di Kecamatan Badau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.7
Data Sarana Ibadah di Kecamatan Badau

NO	DESA	ISLAM		KATHOLIK		PROTESTAN
		MASJID	SURAU	GEREJA	KAPEL	GEREJA
1	BADAU	2	3	1	0	3
2	JANTING	0	0	0	0	0
3	KEKURAK	0	0	0	2	1
4	SEMUNTIK	0	0	0	1	0
5	PULAU MAJANG	1	1	0	0	0
6	SERIAN	0	0	1	0	0
7	SEBIDANG	0	1	0	0	1
8	TINTING SELIGI	0	0	1	0	0
9	TAJUM	0	0	0	0	0
JUMLAH		3	5	3	2	5

Sumber : Seksi Kesra Kec. Badau 2016

3. Perkembangan Pemerintahan di Kecamatan Badau

Sejarah perkembangan Badau sebagai Kecamatan tidak bisa dilepas dari Sejarah Ketatanegaraan pada Zaman Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda seperti diketahui bahwa wilayah Kapuas Hulu secara *De jure* berada di bawah *Afdeeling* Sintang yang dikenal dengan nama *de onderafdeeling Boven Kapoewas* berdasarkan *Gouvernement Besluit van 11 April 1895 No. 9 (Indische Staatsblad 1895 No. 75)* dan untuk mengatur pengawasan ditempatkan seorang kontrolir (*Controleur*) yang berkedudukan di Putussibau, yang secara *de facto* pada tanggal 1 Juni 1895 diangkat kontrolir yang pertama Kapuas Hulu adalah L.C. Westenenk. Untuk membantu tugas-tugas Kontrolir di tiap-tiap wilayah ditempatkan seorang Demang (setingkat Camat) dan Asisten Demang (setingkat Kepala Kantor/Sekcam).

Untuk mengungkap sejarah berdirinya Kecamatan Badau mengalami kendala disebabkan dukungan bukti tertulis yang ada sudah tidak tersedia. Namun berdasarkan penelusuran informasi dan keterangan yang penjelasan dari tokoh masyarakat, Kecamatan Badau berdiri pada 14 Februari 1961 yang sebelumnya merupakan wilayah kecamatan Batang Lupa.

2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Camat mempunyai tugas sebagai berikut

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Camat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Seksi-seksi dengan tugas antara lain :

1. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Aparatur.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan aparatur pengembangan aparatur, tata usaha , rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan Kecamatan;
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan;
- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembinaan kegiatan desa dan/ atau kelurahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Seksi Pemerintahan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;

- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan desa/ kelurahan dalam wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan, dan
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

mempunyai tugas membantu Camat dalam pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/ kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial;
- e. pemantauan kegiatan penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan dan pemberantasan wabah penyakit;
- f. penyelenggaraan administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
 - a. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
 - b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

2.3 STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana digariskan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Struktur Organisasi Kecamatan Badau terdiri dari :

1. Camat dengan Eselon III.a
2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan Eselon III.b
 - Kasubag Program dan Keuangan.
 - Kasubag Umum dan Aparatur.
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.4 SUMBER DAYA SKPD

Sumber yang dimiliki Kecamatan Badau terdiri dari :

1. Sumber Daya Manusia :

Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan

sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi.

Untuk susunan Pegawai dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

TABEL 2.8

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

No	Eselon/ Non Eselon	PANGKAT/GOLONGAN																	
		Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV					
		a	B	c	d	a	B	c	D	a	b	c	d	a	b	c	d	e	Jml
1.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
2.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	6
3.	Non Eselon	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	4
4.	Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah		-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	5	1	-	-	-	-	14

TABEL 2.9

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Eselon/ Non Eselon	PENDIDIKAN										
		SD	SMP	SMA	D 1	D 2	D 3	D 4	S 1	S 2	S 3	Jml
1.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
2.	Eselon IV	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	6
3.	Non Eselon	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
4.	Honorer	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
Jumlah		-	-	10	-	-	1	-	3	-	-	14

2. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Badau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10

Kondisi Bangunan Gedung dan Ruang Kantor Camat badau

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik	
2.	Ruang Camat	1 Ruang	Baik	
3.	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik	
4.	Ruang Kasi Pemerintahan	1 Ruang	Baik	
5.	Ruang Kasi Ekon Bang	1 Ruang	Baik	
6.	Ruang Kasi Kasi Kesra	1 Ruang	Baik	
7.	Ruang Kasi Trantibum	1 Ruang	Baik	
8.	Ruang Kasubbag Program dan Keu.	1 Ruang	Baik	
9.	Ruang Kasubbag Personil dan Umum	1 Ruang	Baik	
10.	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik	
11.	Ruang Arsip/Sekretariat	1 Ruang	Baik	
12.	Ruang Tamu	1 Ruang	Baik	
13.	Toilet	5 Ruang	Baik/Rusak Ringan	
14.	Dapur	1 Ruang	Baik	
15.	Areal Parkir	1 Ruang	Baik	

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Kecamatan Badau selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.11

Kondisi Sarana Pendukung Kecamatan Badau

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6
1.	Kendaraan Roda Dua	11	10	1	
2.	Komputer	8	4	4	
3.	Laptop	3	2	1	
4.	Printer	8	6	2	
5.	TV	2	-	2	
6.	Kipas Angin	9	8	1	
7.	Mesim Tik	1	1	-	
8.	Meja ½ Biro	14	12	2	
9.	Kursi	70	70	-	
10.	Kursi Tamu	3	2	1	
11.	Lemari Es	1	1	-	
12.	Filling Kabinet	3	-	3	
13.	Jam Dinding	1	-	1	
14.	Komputer Siak	1	1	-	
15.	Lemari Kayu	9	9	-	

3. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu oerorganisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah Anggaran Kecamatan Badau.

Tabel 2.12
Jumlah Anggaran Kecamatan Badau tiga tahun belakang ini :

NO	RINCIAN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN			KET.
		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Tidak Langsung	1.258.760.000,00	1.239.615.000,00	1.216.054.000,00	
2.	Belanja Langsung :				
	Belanja Pegawai	85.920.000,00	149.680.000,00	102.480.000,00	
	Belnaja Barang dan Jasa	405.998.000,00	523.738.000,00	441.438.000,00	
	Belanja Modal	78.530.000,00	254.700.000,00	26.200.000,00	
	Jumlah	1.829.208.000,00	2.167.733.000,00	1.786.172.000,00	

2.5 KINERJA PELAYANAN SKPD

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kecamatan Badau sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik mempunyai beberapa jenis pelayanan .Pelayanan yang diberikan pada umumnya menyangkut administrasi berbagai kepentingan masyarakat yang terintergrasi dengan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan.. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pelayanan dan waktu untuk memproses pun ada standarnya.

PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien di layani melalui kecamatan. Untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat,.Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan menjadi lebih berkualitas, mudah, murah, cepat, dan transparan.

PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Melalui penyelenggaraan PATEN, Lokasi kecamatan jelas lebih dekat relatif mudah di jangkau masyarakat bila dibandingkan dengan (ibukota) kabupaten dan waktu yang diperlukan juga menjadi lebih sedikit

Adapun jenis pelayanan yang bersumber pada Peraturan Bupati 3 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kapuas Hulu Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

1. Pelayanan Non Perizinan
 - 1) Pelayanan Surat Masuk;
 - 2) Pelayanan Surat Keluar;
 - 3) Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
 - 4) Pelayanan Perubahan Data di Kartu Keluarga;
 - 5) Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
 - 6) Pelayanan Legalisasi KK;
 - 7) Pelayanan Legalisir KTP;
 - 8) Pelayanan Surat Rekomendasi Cacat Fisik Mental;
 - 9) Pelayanan Surat Rekomendasi Bantuan Bencana Alam;
 - 10) Pelayanan Surat Rekomendasi Usulan Bantuan Bibit Tanaman;
 - 11) Pelayanan Surat Rekomendasi Usulan Bantuan Binatang Ternak
2. Pelayanan Perizinan
 - 1) Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 2) Pelayanan Surat Rekomendasi SITU;
 - 3) Pelayanan Surat Rekomendasi SIUP;
 - 4) Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Bengkel;
 - 5) Pelayanan Surat Izin Keramaian

Dalam Menunjang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) tersebut Kecamatan Badau menetapkan Visi dan Misi Pelayanan:

VISI :

Menjadi Pelayanan Publik Garis Depan Yang “MANTAP”

(Mudah, Akselerasi, Nondiskriminatif, Transparan, Akuntabel Dan Pasti)

MISI :

- Meningkatkan Kualitas Aparatur Dalam Pelayanan Publik Ssesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya.**
- Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik Yang Transparan, Akuntabell, Partisipatif, Berkepastian Hukum Dan Tidak Diskriminatif.**
- Pengembangan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Layanan Publik.**

Dalam mencapai Visis dan Misi Pelayanan tersebut Kecamatan Badau Badau telah mengeluarkan 16 Standar Oprasional Prosedur (SOP) untuk 16 jenis pelayanan yang terintergrasi dalam Pelayanan Terpadu Kecamatan.

Untuk pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana tertuang dalam UU no. 23 Tahun 2006 dimana kewenangan melekat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun untuk memperpendek alur waktu dan efisiensi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat, maka diambil kebijakan bersama antara Dinas dan Camat bahwa pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan serta entri data dalam pembuatan KK dan KTP dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Camat dimasing-masing Kecamatan, namun tanda-tangan atas dokumen tersebut tetap Kepala Dinas Dukcapil.

Selain melaksanakan pelayanan diatas Kecamatan Badau juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dengan rutin melakukan monitoring ke desa Secara terjadwal. Kinerja Anggaran (APBD) dengan realisasi (serapan) anggaran Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010-2015 dapat dilihat di Tabel 2.13 dibawah ini :

Tabel 2.13
Kinerja Anggaran (APBD) dengan realisasi (serapan) anggaran
Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010-2015

NO	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan		Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir		Keterangan
			2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KECAMATAN BADAU			312,240,000		321,603,500		385,673,980		399,118,080		488,118,000		628,118,000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	260,760,000	100%	282,488,500	100%	364,673,900	100%	386,868,000	100%	353,868,000	100%	467,788,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	80%	35,015,000	80%	12,295,000	80%	21,000,000	80%	12,250,000	90%	80,250,000	100%	88,480,000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	90%		90%		90%		90%		90%		90%	2,250,000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80%	16,465,000	80%	21,000,000	80%	80	80%	80	80%	44,000,000	90%	69,600,000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LA KIP Perangkat Daerah	B		B	5,820,000	B		B		B	10,000,000	B	-	
	TOTAL					321,603,500		385,673,980		399,118,080		488,118,000		628,118,000	

2.6 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Adapun lingkungan eksternal yang mempengaruhi Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu antara lain sebagai berikut :

- a. Dukungan Pelaksanaan Otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 33 Tahun 2004)

Undang-Undang tersebut merupakan payung dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu yang memberikan ruang gerak pelaksanaan pembangunan daerah melalui mekanisme pembangunan daerah yang demokratis, aspiratif, serta memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan kreativitasnya dalam pembangunan berdasarkan sumber daya lokal yang dimiliki dalam kerangka NKRI. Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Th.2014 sebagai berikut : Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

- b. Posisi Strategis

Wilayah Kecamatan Badau yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga (Malaysia) dan Nanga Badau Sebagai Ibu Kota Kecamatan merupakan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang ada di Kalimantan dan Kecamatan Badau menjadi Lokasi prioritas I Penanganan Tahun 2010 – 2016 dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan kawasan perbatasan yang mandiri dengan fungsi utama koleksi, pengolahan dan distribusi barang/jasa serta pusat promosi potensi kawasan.

Dengan dibangunnya PPLB Nanga Badau-Lubuk Antu yang merupakan satu dari enam PPLB yang telah disepakati dengan pihak Serawak (malaysia) untuk dibuka

diperbatasan Kalimantan Barat-Serawak menjadikan Kecamatan Badau sebagai pintu gerbang perdagangan lintas batas RI-Malaysia sehingga diharapkan dapat menumbuh kembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususdi Kecamatan Badau maupun di Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.. PPLB Nangga Badau-Lubuk Antu telah resmi dibuka pada tanggal 12 Desember Tahun 2014. Posisi strategis ini memungkinkan Kapuas Hulu untuk menjalin hubungan perdagangan yang bersifat regional, sub-regional, maupun internasional melalui kerjasama perdagangan baik yang bersifat sub-regional, bilateral, maupun multilateral.

c. Ketersediaan Sumber Daya Alam

1. Sektor Perkebunan

Kecamatan Badau pada umumnya tanah berbukit dan bergelombang dengan jenis tanah *podsolik* merah kuning dan *litosol* dengan struktur penggunaan tanah bervariasi seperti sawah lahan kering, sawah tadah hujan, perkebunan karet rakyat dan lada, ubi kayu, pisang serta sayuran.

Disisi lain sebagian besar tanah terlantar (lahan tidur) bekas area peladangan yang tidak diusahakan masyarakat diserahkan kepada perusahaan PT. Buana Tunas Sejahtera dan PT. Sentra Karya Manunggal meliputi wilayah Desa Badau, Janting, Kekurak, Semuntik, Sebindang, dan Tinting Seligi. Sedangkan Desa lain Seriang dan Tajum dikelola PT. Kapuas Agro Abadi, PT. Buana Tunas Sejahtera dan PT. Sentra Karya Manunggal Regional Kecamatan Badau Selengkapnya dapat dilihat dari data berikut ini:

Tabel 2.14
Data Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau

NO.	PERUSAHAAN	IZIN LOKASI	PLANTABLE AREA	TANAM		
				INTI	PLASMA	TOTAL
1	PT. BUANA TUNAS SEJATERA	19,500	18,900	5,185	1,005	6,190
2	PT. SENTRAKARYA MANUANGGAL	19,800	15,477	4,325	1,458	5,783
	JUMLAH	39,300	34,377	9,510	2,463	11,973

Sumber: Paparan PT BTS dan SKM, 2016

Tabel.2.15

Data Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit

di Kecamatan Badau

URAIAN	2010	2015
LOKAL (KAPUAS HULU)	404	2,101
LUAR DAERAH (DALAM KALBAR)	-	1,285
AKAD (LUAR KALBAR)	-	762
TOTAL	404	4,148

Sumber: Paparan PT BTS dan SKM, 2014

Tabel. 2.16

Data Tenaga Kerja Adminitrasi Lokal Perkebunan Kelapa Sawit

di Kecamatan Badau

STAF	JUMLAH
PEMITRA	10
PERIJINAN	1
STAF ADMINISTRASI	4
ASISTEN AGRONOMI	2
PENDIDIKAN DIII IPB	1
TOTAL	18

Sumber: Paparan PT BTS dan SKM, 2014

Tabel. 2.17

Data CSR yang telah dikucurkan Perkebunan Kelapa Sawit

NO.	JENIS BANTUAN	JUMLAH	NILAI	KK	JIWA
1	RUMAH PANJANG	113 PINTU	Rp 4,405,616,098.00	113	660
2	JALAN DAN JEMBATAN	89 KM	Rp. 2,192,025,792.00	509	2,082
3	INSTALASI AIR BERSIH	36 KM	Rp. 966,363,485.00	163	723
4	FASILITAS UMUM	18 UNIT	Rp. 772,274,025.00	111	333
5	BAKTI SOSIAL	27 KALI	Rp. 243,148,811.00	516	992

Sumber: Paparan PT BTS dan SKM, 2014

2. Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Pada sektor pertanian di Kecamatan Badau tersebar di beberapa Desa antara lain desa Seriang, sebindang, Badau dan Janting. Disebabkan pola pengelolaan sawah yang masih terbatas menyebabkan hasil produksi padi masyarakat belum menunjukan titik capai yang diharapkan. Disamping itu juga, areal persawahan yang perlu dibuka baru membutuhkan pembimbingan yang intensif dari tenaga penyuluh.

Usaha penanaman sayuran masyarakat Kecamatan Badau terlihat cukup menggembirakan yang dapat ditemui pada saat penjualan sayur-mayur setiap harinya cukup bervariasi walau masih dalam jumlah yang terbatas. Tantangan dalam mengembangkan komoditi ini adalah :

- 1 Kesadaran dan budaya kerja masyarakat yang belum mau memanfaatkan pekarangan rumah, lahan kosong dan hanya terbatas pada pengerjaan ladang berpindah serta pola tanam sayuran secara tumpang sari.
- 2 Masyarakat di Kecamatan Badau secara perlahan beralih pekerjaan dari petani peladang menjadi tenaga kebun pada perusahaan, hal ini jika tidak ada diantisipasi dapat menyebabkan kehilangan tersedianya sayuran secara berkesinambungan di prasarana.

Tabel. 2.18
Data Tanaman Pangan untuk lahan Basah Kecamatan Badau

No	Tanah Sawah Potensial	Desa (Ha)									Jlh Total (Ha)
		Badau	Janting	Kekurak	Semuntik	Pulau Majang	Sebindang	Seriang	Tintin seligi	Tajum	
1	Sawah Pengairan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sawah Pengairan ½ Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sawah Pengairan Irigasi Desa	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15
4	Sawah Pengairan Tadah Hujan	-	15	11	19	-	10	17	12	16	100
5	Lebak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sawah Pengairan Pasang Surut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kolam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pagong Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	30	11	19	-	10	17	12	16	115

Sumber: Koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kec. Badau 2016.

Tabel. 2.19
Data Tanaman Pangan Untuk Lahan Kering Kecamatan Badau

No	Tanah Darat	Desa (Ha)									Jlh Total (Ha)
		Badau	Janting	Kekurak	Semuntik	P. Majang	Sebindang	Seriang	Tinting seligi	Tajum	
1	Pekarangan	18	8	15	5	5	10	5	8	12	77
2	Huma / Ladang	16	47	54	53	13	51	39	36	41	350
3	Tegal / Kebun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perkebunan	57	150	15	21	2	19	22	46	12	218
5	Padang Rumput / Padang Gembala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lain-lain	16	18	23	26	14	20	21	26	22	186

Sumber: Koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kec. Badau 2016

Tabel. 2.20
Data Tanaman Palawija Kecamatan Badau

No	Tanah Darat	Desa (Ha)									Jlh Total (Ha)
		Badau	Janting	Kekurak	Semuntik	P. Majang	Sebindang	Seriang	Tinting seligi	Tajum	
1	Keledai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kacang Hijau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kacang Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jagung	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5	1,5
5	Ubi Jalar	-	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
6	Ubi Kayu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9

Sumber: Koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kec. Badau 2016

d. Sektor Perikanan

Sektor perikanan di Kecamatan Badau memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan terutama di wilayah desa Pulau Majang dan sekitar kaki bukit Empaik.Disampaing ikan air tawar, saat ini masyarakat setempat juga mulai membudidayakan ikan Arwana, Mas, Jelawat, Nila dengan menggunakan kolam sebagai medianya.

Untuk pengembangan sekktor perikanan ikan air tawar di Pulau Majang perlu system yang menyeluruh dan tidak hanya bertumpu pada kualitas air yang cukup, tapi perlu juga disiapkan unit pembibitan, unit pengolahan pakan, dan teknik pengolahan hasil serta pemasaran.

e. Sektor Peternakan

Sektor peternakan sangat erat kaitannya dengan kondisi geografis di Kecamatan Badau, karena lahan dan rumput atau pun jenis tumbuhan lain yang menentukan

jenis hewan yang dapat dipelihara. Menurut kondisi geografis yang memungkinkan untuk dikembangkan di Kecamatan Badau adalah :

1. Lokasi peternakan sapi baik sapi lokal maupun sapi bali yang cocok dikembangkan di Desa Badau dan Janting. Yang sudah mendapatkan bantuan sapi dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Sosial pada Tahun 1999 di Desa Kekurak dan Dinas Peternakan pada Tahun 2006 adalah Desa Badau dan Janting, namun belum diketahui bagaimana hasilnya. Peternakan ini cocok untuk dikembangkan mengingat kebutuhan akan daging sapi semakin hari semakin meningkat.
2. Peternakan babi di Kecamatan Badaumasih peternakan tradisional dan kebanyakan dipelihara di rumah betang.
3. Peternakan ayam ras pedaging sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah Desa Badau, Desa Janting dan Desa Sebindang Saat ini sudah ada yang mengusahakan peternakan ayam pedaging tersebut.

Tabel. 2.21
Data Peternakan di Kecamatan Badau

No	Peternakan	Desa (Ekor)									Jlh Total (ekor)
		Badau	Janting	Kekurak	Semuntik	P. Majang	Sebindang	Seriang	T. seligi	Tajum	
1	Sapi	13	4	-	-	7	5	-	-	-	29
2	Babi	101	123	463	207	9	125	96	121	267	1.512
3	Kambing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Ayam Ras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ayam Buras	1.473	810	250	297	300	346	372	408	501	4.757
6	Itik	17	11	10	5	12	6	15	14	17	107

Sumber: Koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kec. Badau. 2016.

f. Sektor Perdagangan dan Peridustrian

1. Sektor Industri Kecil

Sektor industri dalam skala kecil di Kecamatan Badau dijumpai dalam bentuk usaha meubeler yang membuat jendela dan pintu, meja maupun lemari yang utamanya terbuat dari kayu. Pengrajin Logam (bahasa lain Usaha Sementing) juga menjadi salah satu jenis usaha masyarakat yang cukup menjanjikan.

Kendala dalam usaha sementing ini belum adanya market yang berorientasi ke dalam negeri, sejauh ini sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat Malaysia.

2. Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan di Kecamatan Badau jika di tinjau dari segi perputaran arus barang, jasa dan uang cukup tinggi jumlahnya, mempunyai prospek yang cukup bagus. Hal ini tidak lain karena posisi strategis Badau dan rencana strategis pengembangan kawasan perbatasan yang dipusatkan di Kecamatan Badau. Adapun jumlah pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan dan industri kecil untuk tahun 2016 adanya penambahan yang signifikan. Hal ini disebabkan pusat pembangunan dan perkembangan wilayah perbatasan dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir cukup dikarenakan untuk meningkatkan daya saing dan ekonomi masyarakat diperbatasan. Adapun jumlah perdagangan dan industri kecil yang terdata dan memiliki izin seperti SIUP, SITU dan TDP dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.22
Jumlah Perdagangan dan Industri Kecil

No	Nama Usaha	Jumlah	Keterangan
1	Penginapan	6	
2	Bengkel Motor	5	
3	Bengkel Mobil	8	
4	Kios Minyak	22	
5	Pedagang/Toko	44	
6	Warung Kopi	12	
7	Rumah Makan	12	
8	Counter HP/Jual Pulsa	5	
9	Salon/Gunting Rambut	6	
10	Mebel	6	
11	Cucian Mobil/Motor	6	
JUMLAH		129	

Sumber : Seksi Ekonbang Kec.Badau 2016

Untuk mendukung peningkatan sub sektor perdagangan, BNPP telah membangun fasilitas berupa Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Badau Tahun 2011 yang menjadi fasilitas bagi pedagang sayuran.

3. Sektor Koperasi

Untuk sektor koperasi di Kecamatan Badau yang memiliki badan hukum secara permanen sudah cukup banyak antara lain,yaitu adanya lembaga usaha dalam bentuk credit union (CU) serta lembaga usaha simpan pinjam lain, yang kegiatan utamanya memberikan bantuan kepada anggotanya melalui kredit simpan pinjam dengan bunga yang cukup terjangkau.

Tabel. 2.23
Data Koperasi di Kecamatan Badau

No	NAMA KOPERASI	BIDANG USAHA	KETERANGAN
1	CU. TILUNG JAYA	Simpan Pinjam	
2	CU. KELING KUMANG	Simpan Pinjam	
3	KPN BUKIT PERAK	Simpan Pinjam	Kantor Camat Badau

Sumber : Seksi Ekonbang Kec.Badau 2016

g. Sektor Kebudayaan dan Pariwisata

1. Budaya Lokal

Ditilik dari unsur budaya lokal masyarakat di Kecamatan Badau ada dua budaya lokal yang masing-masing mempunyai keunikan tersendiri sebagai khasanah budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya dalam rangka memperkaya pariwisata di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun budaya masyarakat lokal tersebut adalah :*Pertama* budaya masyarakat Suku Melayu yang antara lain : kesenian tari jepin, pantun,kesenian tar, pengajian-pengajian, adat perkawinan, kelahiran dan kematian, syair-syair Melayu yang bernafaskan Islami dan lain sebagainya.

Kedua budaya masyarakat Suku Dayak Iban yang antara lain :Bedara (acara buang pantang), Ngajat (tarian Dayak), adat perkawinan, kelahiran dan kematian, serta pesta gawai selepas panen padi. Yang keduanya memerlukan perhatian yang cukup serius mengingat dengan adanya perubahan zaman akan mengakibatkan punahnya kedua unsur budaya lokal di Kecamatan Badau tersebut.

2. Kepariwisataaan

Potensi Pariwisata di Kecamatan Badau cukup menjanjikan, hal tersebut dikarenakan sebagian wilayahnya masuk dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Danau Sentarum yang sudah terkenal baik nasional maupun internasional.

Selain Taman Nasional Danau Sentarum potensi kepariwisataan berupa air terjun seperti Air terjun Wong kijang di Dusun Telian, Wong Perawan Dusun Kekurak yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Saat ini baru diusahakan untuk kepentingan air bersih saja, sementara untuk penggunaan lain seperti kepariwisataan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) belum dapat dikembangkan karena adanya penataan dan upaya mempercantik lokasi tersebut menjadi salah satu kendala.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi yang ada di Kecamatan Badau Kabupaten Kapus Hulu, internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan peningkatan kinerja dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat).

a. Lingkungan Internal

Untuk keperluan analisis lingkungan dalam ini, semua aspek unit kerja di Kecamatan Badau Kabupaten Kapus Hulu, khususnya yang menyangkut tugas pembangunan dan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Badau Kabupaten Kapus Hulu, akan di kaji. Hal ini dimaksudkan agar ada gambaran yang utuh atas aspek-aspek yang ada tentang kondisi Kecamatan Badau Kabupaten Kapus Hulu. Pembahasan atas aspek lingkungan dalam (internal) ini meliputi faktor kekuatan dan kelemahan. Yang dimaksud dengan faktor kekuatan adalah suatu potensi yang mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan kelemahan adalah segala sesuatu yang dipandang menghambat pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan atas potensi dan kondisi di Kecamatan Badau Kabupaten Kapus Hulu saat ini, maka dapat dianalisis tentang kondisi lingkungan dalam (internal) Kecamatan Badau Kabupaten Kapus Hulu, melalui analisis kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenght) :

- a. Letak Geografis Kecamatan Badau yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga (Malaysia) dan Nanga Badau Sebagai Ibu Kota Kecamatan merupakan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang ada di Kalimantan, dengan dibangunnya PPLB Nangga Badau-Lubuk Antu dan telah resmi dibuka pada tanggal 12 Desember Tahun 2014 merupakan satu dari enam PPLB yang telah disepakati dengan pihak Serawak (malaysia) untuk dibuka diperbatasan Kalimantan Barat-Serawak menjadikan Kecamatan Badau sebagai pintu gerbang perdagangan lintas batas RI-Malaysia sehingga diharapkan dapat menumbuh kembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat khusus di Kecamatan Badau maupun di Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya. Posisi strategis ini memungkinkan Kecamatan Badau

khususnya dan Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya untuk menjalin hubungan perdagangan yang bersifat regional, sub-regional, maupun internasional melalui kerjasama perdagangan baik yang bersifat sub-regional, bilateral, maupun multilateral.

- b. Kecamatan Badau merupakan daerah perkebunan di mana sebagian besar tanah terlantar (lahan tidur) bekas area peladangan yang tidak diusahakan masyarakat diserahkan kepada perusahaan PT. Buana Tunas Sejahtera dan PT. Sentra Karya Manunggal untuk ditanami sawit meliputi wilayah Desa Badau, Janting, Kekurak, Semuntik, Sebindang, dan Tinting Seligi. Sedangkan Desa lain Seriang dan Tajum dikelola PT. Kapuas Agro Abadi. Dan dengan dibangunnya pabrik pengolahan CPO di wilayah Kecamatan Badau membuat pesatnya perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Badau.
- c. Wilayah Kecamatan Badau yang sebagian wilayahnya berada dalam Taman Nasional Danau Sentarum berpeluang untuk mengembang potensi perikanan dan wisata alam, hal ini ditunjang dengan adanya PPLB Nanga Badau yang merupakan Pintu Gerbang Negara Republik Indonesia yang memungkinkan turis manca negara untuk berkunjung ke Kecamatan Badau dan hasil perikanan yang diproduksi masyarakat dapat diperdagangkan ke luar negeri (Malaysia).
- d. Kecamatan Badau memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai, mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA maupun SMK.
- e. Memiliki lembaga keuangan yang cukup, baik Bank maupun Credit Union (CU) untuk menunjang perkembangan perekonomian masyarakat.
- f. Masih kurangnya dana oprasional kecamatan dalam menunjang kegiatan pemerintahan maupun pelayanan
- g. Memiliki fasilitas sosial kemasyarakatan cukup lengkap seperti masjid, gereja, mushola, kapel, lapangan olah raga dan lainnya

2. Kelemahan (Weakness) :

- a. Terjadinya penurunan luas lahan pertanian akibat dari perubahan lahan kosong menjadi kebun sawit
- b. Masyarakat di Kecamatan Badau secara perlahan beralih pekerjaan dari petani peladang menjadi perkerja di perkebunan sawit, hal ini membuat komoditi pertanian maupun palawija sulit berkembang.
- c. Ketertinggalan kompetensi penyelenggara pemerintahan, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa, akibat dari ketidakmampuan SDM dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- d. Diklat pengetahuan tentang pemerintahan, keuangan dan diklat-diklat teknis bagi pegawai belum merata baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa.

Lingkungan External

Untuk keperluan analisis lingkungan luar (External), perspektif yang dipakai adalah kondisi di luar organisasi di Kecamatan Badau Kabupaten Kapus Hulu, yang merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan. Juga peluang untuk mengembangkan diri keluar Kecamatan Badau Kabupaten Kapus Hulu. Lingkungan luar ini dapat berupa kebijakan pemerintah yang ada diatas, potensi pasar, para stake holder, para pengguna jasa layanan dan lain-lain yang berada di luar komponen Kecamatan Badau Kabupaten Kapus Hulu. Pemaparan untuk kondisi di lingkungan luar ini juga disesuaikan dengan analisis lingkungan dalam yaitu mengacu pada tupoksi Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, yang melaksanakan urusan wajib di bidang pemerintahan umum Kabupaten Kapuas Hulu, secara berurutan di sajikan sebagai berikut :

1. Peluang (Oppurtunity) :

- a. Sembilan Program Prioritas (Nawa Cita) Pemerintahan Joko Widodo – Yusup Kalla yang salah satunya adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI termasuk di dalamnya Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia.
- b. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Permendagri Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, pasal 3 ayat 1 disebutkan 35% dari kelulusan angkatan 23 dan 24 ditempatkan pada kawasan perbatasan, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas aparatur di kecamatan perbatasan termasuk di dalamnya Kecamatan Badau.
- d. Adanya Diklat Teknis Bidang pemerintahan, keuangan dan diklat lainnya sebagai penunjang tugas pokok dan fungsi
- e. Komodoti unggulan seperti kelapa sawit dan perikanan pasarnya masih sangat terbuka dalam menghadapi Masyarakat Economic Community (MEA) 2015
- f. Ketersediaan lembaga dan kemudahan akses terhadap permodalan

2. Hambatan (threat) :

- a. Kesenjangan social ekonomi dengan negara tetangga yang mengakibatkan masyarakat cenderung berorientasi ke kawasan negara tetangga untuk memenuhi berbagai kepentingannya..

- b. Jarak yang terlalu jauh dari ibu kota provinsi dan infrastruktur yang belum memadai sehingga komoditi dalam negeri lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di negara tetangga.
- c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dan aparatur pemerintahan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa masih rendah
- d. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif
- e. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Badau berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021. yang merupakan penjabaran Visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih.

VISI Kabupaten Kapuas Hulu :

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke arah mana dan bagaimana Kabupaten Kapuas Hulu akan dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas Hulu. Pernyataan Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS “

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan

pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

Misi Kabupaten Kapuas Hulu

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH

Misi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas

2. MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatkan Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

3. MENINGKATKAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan Meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical success factor yang merupakan strategi kunci untuk Kecamatan Badau yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Kuantitas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai.
2. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.
3. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai.
5. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi.

6. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kecamatan Badau adalah kecamatan yang wilayahnya sangat strategis dengan Nanga Badau sebagai Ibu Kota Kecamatan Badau termasuk dari 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Di samping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga (Malaysia) dan Nanga Badau Sebagai Ibu Kota Kecamatan merupakan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang ada di Kalimantan dan Kecamatan Badau menjadi Lokasi prioritas I Penanganan Tahun 2010 – 2016 dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan kawasan perbatasan yang mandiri dengan fungsi utama koleksi, pengolahan dan distribusi barang/jasa serta pusat promosi potensi kawasan.

Dengan dibukanya PPLB Nangga Badau-Lubuk Antu yang merupakan satu dari enam PPLB yang telah disepakati dengan pihak Serawak (malaysia) untuk dibuka diperbatasan Kalimantan Barat-Serawak menjadikan Kecamatan Badau sebagai pintu gerbang perdagangan lintas batas RI-Malaysia sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat khusus di Kecamatan Badau maupun di Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

Kecamatan Badau merupakan daerah perkebunan di mana sebagian besar tanah terlantar (lahan tidur) bekas area peladangan yang tidak diusahakan masyarakat sudah ditanami kelapa sawit dan dengan dibangunnya pabrik pengolahan CPO di wilayah Kecamatan Badau membuat Kecamatan Badau menjadi pusat ekonomi khususnya di daerah perbatasan.

Dengan adanya Taman Nasional Danau Sentarum berpeluang untuk mengembangk potensi perikanan dan wisata alam, yang memungkinkan turis manca negara untuk berkunjung ke Kecamatan Badau dan hasil perikanan yang diproduksi masyarakat dapat diperdagangkan ke luar negeri (Malaysia).

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kantor Kecamatan Badau sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
3. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
4. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan SKPD

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Kecamatan Badau menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Kecamatan Badau Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Data Awal	Target 2021
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih			
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai IKM	-	85
	Predikat Sakip	-	BB
Tujuan 2 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	10%	50%
	Prosentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu	80%	100%
	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	10%	70%

4.2 Sasaran SKPD

Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sesuai sumber daya yang dimiliki serta alokasi setiap tahun anggaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

Tabel 4.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Badau Tahun 2016 - 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM	-	-	75	80	85
		Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Badau	Predikat SAKIP	-	-	CC	B	BB
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	10	15	30	40	50
			Prosentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	20	25	50	60	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi SKPD

Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Badau untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan Badau yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Kapuas Hulu. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Kecamatan Badau menunjukkan bagaimana SKPD Kecamatan Badau mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Badau.

Berangkat dari tujuan dan sasaran di atas, maka strategi SKPD Kecamatan Badau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapabilitas SDM Aparatur
2. Koordinasi internal dan eksternal
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur
4. Pengembangan potensi local
5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan hidup beragama
6. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholder

1.2 Kebijakan SKPD

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, kebijakan yang ditempuh SKPD Kecamatan Badau adalah sebagai berikut::

1. Menjalin komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
3. Skala prioritas program dan kegiatan pembangunan
4. Orientasi penganggaran yang berbasis kinerja
5. Fasilitasi pengembangan produk local/local specific.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan nilai-nilai keagamaan.
7. Penerapan tata pemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional / kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Adapun program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efesiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program pelayanan administrasi perkantoran dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Pengamanan, Kebersihan Lingkungan Kantor;
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11. Penyediaan Makanan dan Minuman;

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
14. Pembinaan Kemasyarakatan
15. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan
16. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
17. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD
18. Penyusunan RKA dan DPA
19. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
20. Monitoring Pelaksanaan ADD
21. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Kecamatan Badau. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional;
2. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas/Jabatan
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Kecamatan Badau. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
3. Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD
4. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SKPD;

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan produktivitas kerja aparatur Kecamatan Badau. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur Kecamatan Badau dalam memberikan pelayanan publik sehingga menjadi aparatur yang profesionalisme. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi kecamatan yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi seksi-seksi :

1. Pembinaan dan Monitoring Bidang Pemerintahan
2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Monitoring Pelaksanaan Penyelesaian Tapal Batas Desa
5. Pendataan Administrasi Pertanahan
6. Pembinaan dan Monitoring Bidang Ekonomi
7. Pembinaan dan Monitoring Bidang Pembangunan
8. Pembinaan dan Monitoring Bidang Kesejahteraan Masyarakat
9. Penyusunan Monografi Kecamatan Penyusunan Monografi Kecamatan
10. Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat
11. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
12. Pembinaan dan Monitoring Kesehatan Masyarakat
13. Pembinaan dan Monitoring Bantuan Sosial
14. Pembinaan dan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum
15. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
16. Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dapat dilihat di Tabel 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021

NO	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KECAMATAN BADAU				520,118,000		548,000,000		820,558,784		814,211,859		797,483,281	KECAMATAN BADAU
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	370,235,500	100%	422,000,000	100%	567,725,234	100%	563,333,947	100%	551,759,838	KECAMATAN BADAU
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	100%	54,000,000	100%	61,000,000	100%	82,804,492	100%	82,164,009	100%	80,475,690	KECAMATAN BADAU
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	90%	90%		93%	15,000,000	95%	23,001,248	98%	22,823,336	98%	22,354,414	KECAMATAN BADAU
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	85%	85%	39,000,000	87%	44,000,000	90%	59,803,244	95%	59,340,673	100%	58,121,476	KECAMATAN BADAU
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	85%	85%	51,592,500	85%		87%	79,112,792	90%	78,500,864	95%	76,888,006	KECAMATAN BADAU
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAMP Perangkat Daerah	DD	D	5,290,000	C	6,000,000	CC	8,111,773	B	8,049,030	BB	7,883,657	KECAMATAN BADAU
	TOTAL				520,118,000		548,000,000		820,558,784		814,211,859		797,483,281	

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD KECAMATAN BADAU YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016 – 2021

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja SKPD Kecamatan Badau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Kapuas Hulu adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Kecamatan Badau dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja SKPD Kecamatan Badau dijelaskan pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Badau Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Aspek /Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Nilai IKM	ANGKA				75	80	85	
2	Predikat SAKIP	NILAI				CC	B	BB	
3	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	%	10%	10%	15%	30%	40%	50%	
4	Prosentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu	%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	10%	20%	25%	50%	60%	70%	

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Badau tahun 2016 – 2021 merupakan rencana pembangunan jangka menengah SKPD, dan disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Renstra SKPD Kecamatan Badau ini juga merupakan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Badau selama lima tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra SKPD Kecamatan Badau ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan, aparatur SKPD Kecamatan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan.

Dengan tersusunnya Renstra SKPD Kecamatan Badau ini diharapkan rencana pembangunan SKPD Kecamatan Badau dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya Visi Kabupaten Kapuas Hulu dapat terwujud.

Demikian penyusunan Renstra ini disampaikan untuk dapat menjadi bahan serta pedoman bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas. Apresiasi tak terhingga juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyusunan Rencana Strategis tersebut. Semoga apa yang telah kita perbuat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada khususnya serta pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya. Terima kasih.

Mengetahui :
CAMAT BADAU.



Drs. AHMAD SALAFUDDIN
Pembina Tk.I

NIP. 19621004 198603 1 014